Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN DI KELURAHAN LALANG KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

Jessica Jasmin Muchtar[1], Emi Triani S,Sos., M.Si[2]

[12] Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

emailpenulis
semuaditulis@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian melalui program perlindungan sosial. Salah satu upaya pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang bertujuan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori implementasi George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH telah berjalan cukup baik melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Program ini memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa ketidakakuratan data penerima bantuan serta hambatan birokrasi dalam pengurusan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Secara keseluruhan, PKH memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Lalang.

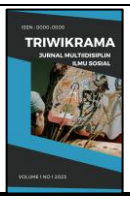
Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Sosial, Keluarga Miskin

A B S T R A C T

Poverty is a social issue that requires attention through social protection programs. One of the government's efforts is the Family Hope Program (PKH), which aims to improve access to education, healthcare, and the social welfare of poor families. This study aims to analyze the implementation of PKH in improving the welfare of poor families in Lalang Village, Medan Sunggal District. The research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis uses George C. Edwards III's implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucracy. The results of the study show that the implementation of PKH has been running quite well through the Family Capacity Improvement Meeting (P2K2) activities This program provides benefits in meeting the educational, health, and nutritional needs of beneficiary families. However, its implementation still faces obstacles such as inaccurate data on aid recipients and bureaucratic hurdles in managing the Family Welfare Card (KKS). Overall, PKH contributes positively to improving the welfare of poor families in Lalang Village.

***Keywords**: Implementation, Family Hope Program (PKH), Social Welfare, Poor Families*

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional serta masih menjadi tantangan dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Solikatun et al., 2014). Apabila kebutuhan dasar tidak dapat dipenuhi dengan baik, masyarakat akan mengalami kondisi kesejahteraan yang rendah dan berpotensi berada dalam kondisi miskin (Suharto, 2014). Oleh karena itu, pemerintah perlu melaksanakan berbagai kebijakan perlindungan sosial sebagai upaya untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2021). Melalui pendekatan Conditional Cash Transfer (CCT), bantuan tidak hanya ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

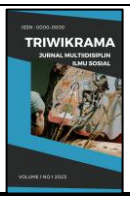
Keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bantuan, tetapi juga oleh proses implementasi kebijakan di tingkat masyarakat. Implementasi menjadi tahap penting karena kebijakan yang telah ditetapkan harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, kelurahan, pendamping PKH, kepala lingkungan, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pelaksanaannya, komunikasi, koordinasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta prosedur birokrasi menjadi faktor yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan program.

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal menjadi menarik untuk dikaji karena wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang memiliki masyarakat prasejahtera dengan kondisi sosial yang cukup dinamis. Berdasarkan hasil penelitian, PKH menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial yang membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pihak kelurahan berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan program, membantu administrasi masyarakat, serta mendukung proses pengusulan dan validasi data. Sementara itu, pendamping PKH berperan dalam memberikan sosialisasi, pendampingan, pemantauan, serta menyampaikan hak dan kewajiban KPM melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Meskipun demikian, implementasi PKH di Kelurahan Lalang masih menghadapi beberapa permasalahan. Sebagian masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh mengenai kriteria penerima, mekanisme penetapan penerima, serta hak dan kewajiban KPM. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, dinamika kondisi sosial ekonomi dan mobilitas penduduk menyebabkan data penerima bantuan perlu diperbarui secara berkala. Hasil penelitian juga menemukan adanya ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat di lapangan dengan data penerima bantuan, sehingga ketepatan sasaran menjadi salah satu persoalan dalam implementasi PKH.

Permasalahan lainnya terdapat pada aspek administrasi pencairan bantuan. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digunakan dalam proses penyaluran bantuan terkadang mengalami kendala, seperti hilang, rusak, atau tidak dapat terbaca sehingga dapat menyebabkan keterlambatan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



penerimaan bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi PKH tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendampingan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketepatan data dan kelancaran prosedur administrasi dalam proses penyaluran bantuan.

Untuk menganalisis pelaksanaan PKH tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang terdiri atas empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk melihat bagaimana informasi program disampaikan, bagaimana ketersediaan sumber daya mendukung pelaksanaan program, bagaimana komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, serta bagaimana prosedur dan koordinasi birokrasi berlangsung. Kerangka tersebut digunakan untuk melihat faktor pendukung maupun hambatan dalam implementasi PKH di Kelurahan Lalang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian ini juga melihat bagaimana pelaksanaan PKH memberikan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan sosial, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih ditemukan dalam pelaksanaannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

Implementasi meupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapakan. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan aturan, tetapi juga melibatkan berbagai unsur, seperti pelaksana kebijakan, organisasi, sumber daya, kelompok sasaran, serta koordinasi antar pihak. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III (1980). Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan.

Komunikasi

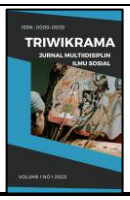
Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi dari pelaksana kepada kelompok sasaran. Komunikasi yang efektif membantu pelaksana memahami tujuan, prosedur, dan ketentuan program sehingga kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan, komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pendamping PKH, aparat kelurahan, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif. Komunikasi yang baik juga berfungsi meminimalkan kesalahpahaman serta memastikan bahwa seluruh pihak memahami hak dan kewajibannya dalam program.

Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, informasi, dan kewenangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan, ketersediaan pendamping yang kompeten, data KPM yang akurat, dukungan anggaran, serta kewenangan yang jelas menjadi faktor penting agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendukung pelaksanaan program dan mempermudah pencapaian tujuan kebijakan.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan integritas para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam implementasi Program Keluarga Harapan, disposisi tercermin dari komitmen pendamping dan pihak terkait dalam menjalankan program sesuai ketentuan yang berlaku. Sikap yang positif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat akan mendukung tercapainya tujuan program secara optimal.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, koordinasi antarinstansi, dan prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi yang jelas akan mendukung implementasi Program Keluarga Harapan melalui pembagian tugas yang terarah, koordinasi yang baik, serta penerapan standar operasional prosedur yang sesuai. Koordinasi antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, dan pendamping PKH menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH menggunakan pendekatan **Conditional Cash Transfer (CCT)** dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2021). PKH tidak hanya bertujuan memberikan bantuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, tetapi juga mendorong perubahan perilaku keluarga penerima manfaat agar lebih memperhatikan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, pelaksanaan PKH diharapkan dapat membantu keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

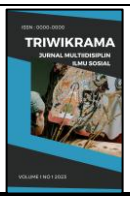
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan keluarga yang telah terdaftar dan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH berdasarkan kriteria yang berlaku. KPM menjadi kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan PKH sehingga pemahaman terhadap hak dan kewajiban menjadi bagian penting dalam keberhasilan program. Dalam pelaksanaan PKH, KPM tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kewajiban sesuai dengan komponen yang dimiliki, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pendampingan dan penyampaian informasi kepada KPM diperlukan agar bantuan dapat digunakan sesuai dengan tujuan program.

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan kondisi ketika individu atau masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memperoleh akses terhadap pelayanan yang mendukung kehidupan yang layak. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi atau pendapatan, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solikatun et al. (2014) menjelaskan bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sementara itu, Suharto (2014) mengaitkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dengan rendahnya tingkat kesejahteraan.

Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan dikaitkan dengan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Manfaat tersebut dilihat dari dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, gizi, serta kebutuhan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lanjut usia. Dengan demikian, PKH dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang membantu memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



2. METODE

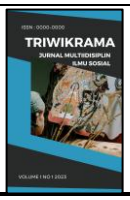
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada penggambaran kondisi dan fenomena yang diteliti berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, hasil pengamatan, dan dokumentasi. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami pelaksanaan PKH, peran pihak-pihak yang terlibat, manfaat program bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta kendala yang muncul selama implementasi program. Analisis penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), yang mencakup empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk memahami proses pelaksanaan PKH di tingkat kelurahan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan lokasi utama di Kantor Kelurahan Lalang yang beralamat di Jalan Balai Desa No. 17, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal. Lokasi penelitian dipilih karena kantor kelurahan menjadi salah satu tempat berlangsungnya koordinasi dan pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pemilihan lokasi ini sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji implementasi PKH pada tingkat kelurahan, khususnya koordinasi antara pemerintah kelurahan, pendamping PKH, dan KPM. Penelitian juga memperhatikan pelaksanaan program di lingkungan masyarakat untuk memperoleh gambaran mengenai penyampaian informasi, penyaluran bantuan, pemenuhan kewajiban KPM, serta manfaat dan hambatan program dalam mendukung kesejahteraan penerima manfaat.

Informan dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Abdussmad (2021), pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling baik mengenai informasi yang dibutuhkan. Sementara itu, Bungin (2011:107) menjelaskan bahwa purposive sampling merupakan strategi penentuan informan berdasarkan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, informan kunci, yaitu Bapak Alwi Husein Batubara selaku pendamping PKH yang memiliki informasi mengenai pelaksanaan dan pendampingan program. Kedua, informan utama, yaitu lima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terdiri atas Ibu Merry, Ibu Rindri, Ibu Husna, Ibu Aminah, dan Ibu Sarmi. Informan utama dipilih karena terlibat langsung dan merasakan manfaat maupun kendala selama menerima bantuan PKH. Ketiga, informan tambahan, yaitu Bapak Umar Dani, S.H. selaku Kepala Kelurahan Lalang, yang memberikan informasi pendukung mengenai peran kelurahan dalam koordinasi dan administrasi pelaksanaan program.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Peran	Nama	Keterangan
1	Pendamping PKH	Alwi Husein Batubara	Informan Kunci
2	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Ibu Merry, Ibu Rindri, Ibu Husna, Ibu Aminah, dan Sarmi	Informan Utama
3	Kepala Lurah Lalang	Umar Dani, S.H	Informan Tambahan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dam dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan fokus penelitian serta mendukung pemahaman terhadap pelaksanaan PKH di Kelurahan Lalang. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap pelaksanaan PKH di lapangan. Pengamatan difokuskan pada interaksi antara pendamping PKH dan KPM, proses penyaluran bantuan, serta kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban penerima manfaat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman semi-terstruktur. eknik ini memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih terbuka dan mendalam sesuai dengan pengalaman informan serta kondisi yang ditemukan selama penelitian. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai komunikasi program, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, prosedur birokrasi, serta manfaat dan kendala pelaksanaan PKH. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap observasi dan wawancara. Data dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto kegiatan, laporan pemantauan, dan data statistik yang relevan dengan fokus penelitian.

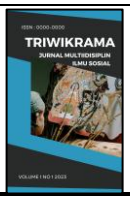
Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia sebagai sumber data utama yang dilengkapi dan didukung data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum, penelitian mempunyai dua jenis sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya atau sumber pertama. Data primer ini merupakan data yang dimaksudkan untuk menjawab fenomena penelitian . Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait ataupun melalui pengamatan langsung dari peneliti dilapangan atau tempat penelitian dilakukan. Sumber data sekunder, yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan dari sumber pertama. Data sekunder dapat diambil dari dokumen-dokumen, buku literatur, jurnal, internet, dan lain-lain. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

Teknik analisis data mengacu pada Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:246–253), yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menurut Sugiyono (2013), analisis data merupakan proses menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis agar informasi yang dihasilkan mudah dipahami.

Reduksi data (*data reduction*), proses merangkum, memilih, dan memusatkan perhatian pada informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dipilah berdasarkan keterkaitannya dengan implementasi PKH di Kelurahan Lalang.

Penyajian data (data display), penyusunan informasi yang telah direduksi secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan hasil penelitian berdasarkan informasi dari para informan serta hasil pengamatan dan dokumentasi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifikcation), proses merumuskan makna dari data yang telah disajikan dan memeriksa kembali kesesuaiannya dengan informasi yang diperoleh selama penelitian. Tahap ini dilakukan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai implementasi PKH.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan pada Mei 2026 dengan informan kunci, yaitu pendamping PKH, Alwi Husein Batubara; lima informan utama yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu Ibu Merry, Ibu Rindri, Ibu Husna, Ibu Aminah, dan Ibu Sarmi; serta informan tambahan, yaitu Lurah Lalang, Umar Dani, S.H. Kelima KPM mewakili komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kelurahan Lalang telah membantu keluarga penerima manfaat memenuhi sebagian kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketepatan data penerima, penyampaian informasi, kecemburuan sosial, dan proses pencairan bantuan.

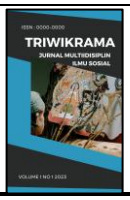
Komunikasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Komunikasi dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Lalang dilakukan melalui koordinasi antara pihak kelurahan, pendamping PKH, kepala lingkungan, dan KPM. Penyampaian informasi dilaksanakan melalui pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pertemuan kelompok bulanan, komunikasi langsung, serta grup WhatsApp. Informasi yang diberikan mencakup ketentuan program, hak dan kewajiban KPM, pemanfaatan bantuan, serta pemenuhan kewajiban pada komponen pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan pendamping PKH, Alwi Husein Batubara, tugas pendamping tidak hanya berkaitan dengan pendampingan administratif, tetapi juga memberikan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat. Pendamping menekankan pentingnya pemanfaatan bantuan sesuai tujuan program. Ia menyampaikan bahwa "bantuan itu sementara, pemberdayaan yang selanjutnya." Pernyataan tersebut menggambarkan upaya pendamping dalam mendorong KPM agar memanfaatkan bantuan secara tepat dan tetap berusaha meningkatkan kondisi kesejahteraan keluarganya.

Keterangan dari Lurah Lalang juga menunjukkan bahwa komunikasi dilaksanakan secara berjenjang. Pihak kelurahan berkoordinasi dengan pendamping PKH dan kepala lingkungan, kemudian informasi diteruskan kepada KPM melalui pertemuan langsung maupun media komunikasi digital. Lurah menjelaskan bahwa pola komunikasi tersebut dilakukan agar informasi mengenai program dapat diterima oleh kelompok penerima manfaat. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap ketentuan PKH belum sepenuhnya merata. Sebagian warga menganggap bahwa seluruh keluarga miskin seharusnya memperoleh bantuan, tanpa memahami adanya komponen dan kriteria tertentu dalam program. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dan keluhan dari warga yang belum menerima bantuan. Selain itu, komunikasi melalui media digital belum dapat menjangkau seluruh KPM secara optimal. Sebagian penerima manfaat lanjut usia mengalami kesulitan menggunakan telepon genggam, sedangkan KPM yang bekerja terkadang kesulitan menghadiri pertemuan kelompok. Dengan demikian, komunikasi telah dilakukan secara rutin melalui berbagai saluran, tetapi masih diperlukan pendekatan yang menyesuaikan kondisi penerima manfaat dan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme PKH.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Sumber Daya dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam pelaksanaan PKH mencakup bantuan yang diterima KPM, peran pendamping, serta dukungan administrasi dan pengelolaan data. Bantuan PKH digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan dasar keluarga. Pemanfaatan bantuan berbeda sesuai dengan komponen yang dimiliki masing-masing KPM.

Pada komponen pendidikan, bantuan dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah, seperti buku tulis, sepatu, pakaian sekolah, dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Ibu Merry, salah satu KPM pada komponen pendidikan, menjelaskan bahwa bantuan tersebut membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya. Namun, bantuan belum mampu menutup seluruh pengeluaran keluarga. Ia menyampaikan, “Kalau dibilang cukup untuk semua ya tidak, Dek. Tapi dana itu sangat pas untuk menutup kekurangan yang mendesak.” Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa bantuan PKH berperan dalam meringankan beban pengeluaran pendidikan, meskipun keluarga masih perlu memenuhi kebutuhan lainnya melalui sumber pendapatan yang tersedia. Hal serupa terlihat pada Ibu Rindri, yang menerima bantuan untuk komponen pendidikan anaknya yang bersekolah di SMA swasta. Kebutuhan pendidikan yang cukup besar membuat bantuan bermanfaat untuk menutup sebagian pengeluaran yang tidak dapat dipenuhi dengan mudah oleh keluarga.

Pada komponen kesehatan, Ibu Aminah memanfaatkan layanan kesehatan masyarakat, khususnya Posyandu Melati di Lingkungan 13, untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan balitanya. Pemantauan dilakukan melalui kegiatan seperti penimbangan berat badan, imunisasi, dan pemeriksaan tumbuh kembang anak. Ibu Aminah juga menghadapi tantangan dalam membagi waktu antara mengurus anak, pekerjaan rumah tangga, dan memenuhi kewajiban administrasi program. Ia menyampaikan, “Mengurus administrasi laporan KIA ke pendamping di tengah kesibukan mengurus balita dan pekerjaan rumah itu cukup melelahkan, apalagi kalau jaringannya sedang susah.” Sementara itu, pada komponen kesejahteraan sosial, bantuan bagi lanjut usia membantu memenuhi sebagian kebutuhan sehari-hari. Ibu Sarmi merupakan penerima manfaat pada komponen lansia yang tidak lagi memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap. Keberadaan bantuan menjadi salah satu dukungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

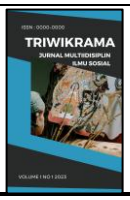
Selain bantuan finansial, sumber daya informasi juga berperan dalam pelaksanaan PKH. Berdasarkan keterangan Lurah Lalang, kantor kelurahan telah memiliki operator dan perangkat komputer untuk mendukung pengoperasian Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG). Sistem tersebut digunakan dalam pengelolaan dan pemutakhiran data penerima bantuan. Namun, penelitian menemukan adanya kendala ketidaksesuaian data penerima. Sebagian warga yang dinilai membutuhkan bantuan belum terdaftar, sedangkan masyarakat mempertanyakan kelayakan beberapa penerima yang masih memperoleh bantuan.

Pendamping PKH juga menyampaikan perlunya akses yang lebih baik terhadap data By Name By Address (BNBA). Menurutnya, akses tersebut dapat membantu pendamping melakukan pemeriksaan dan penanganan masalah KPM dengan lebih cepat tanpa harus selalu memeriksa data melalui sistem terlebih dahulu. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia telah mendukung pelaksanaan program, tetapi ketepatan data, keterbatasan bantuan dalam memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, serta kebutuhan akses informasi yang lebih efektif masih menjadi persoalan dalam pelaksanaannya.

Disposisi dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Hasil penelitian memperlihatkan adanya keterlibatan pendamping PKH dan pihak kelurahan dalam mendukung pelaksanaan program. Pendamping memberikan sosialisasi, pendampingan, dan motivasi kepada KPM agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan serta kewajiban program

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dilaksanakan. Pihak kelurahan turut membantu proses administrasi, koordinasi, dan penanganan keluhan masyarakat.

Partisipasi KPM terlihat melalui keikutsertaan dalam pertemuan kelompok dan pemanfaatan layanan sesuai komponen bantuan. Ibu Rindri, misalnya, rutin mengikuti pertemuan kelompok dan menggunakan sarana komunikasi digital untuk memperoleh informasi. Ibu Aminah menjalankan kewajibannya pada komponen kesehatan dengan membawa balitanya ke posyandu. Sementara itu, Ibu Sarmi menjadi contoh penerima manfaat lanjut usia yang tetap mengikuti kegiatan kelompok.

Walaupun terdapat dukungan dari pelaksana dan partisipasi KPM, penelitian juga menemukan adanya kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan perbedaan kondisi warga yang menerima bantuan dan warga yang belum terdaftar sebagai penerima. Ketua kelompok PKH, Ibu Husna, mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima protes dari masyarakat yang menganggapnya memiliki kewenangan menentukan penerima bantuan. Ia menjelaskan, “Mereka mengira saya pilih kasih dan sengaja tidak mendaftarkan mereka, padahal keputusan itu murni dari birokrasi kementerian pusat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penetapan penerima bantuan dapat menimbulkan tekanan sosial terhadap pengurus kelompok, meskipun keputusan akhir bukan berada pada ketua kelompok. Lurah Lalang juga menjelaskan bahwa kelurahan kerap menerima keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran bantuan. Dalam menghadapi keadaan tersebut, pihak kelurahan memberikan penjelasan mengenai proses dan kewenangan penetapan penerima bantuan.

Selain kecemburuan terkait penerima bantuan, terdapat pula anggapan bahwa keluarga yang masih menerima bantuan seharusnya sudah mampu melepaskan kepesertaannya ketika kondisi ekonomi membaik. Lurah menyebutkan bahwa salah satu tantangan sosial adalah mengubah pola pikir sebagian KPM yang kondisi ekonominya telah meningkat tetapi masih enggan melepaskan bantuan. Secara keseluruhan, keterlibatan pendamping, pihak kelurahan, dan KPM mendukung pelaksanaan PKH. Namun, persoalan kecemburuan sosial, pemahaman masyarakat mengenai kewenangan penetapan penerima, dan perubahan kondisi ekonomi KPM masih menjadi bagian dari tantangan pelaksanaan program.

Birokrasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan PKH di Kelurahan Lalang melibatkan koordinasi antara pemerintah kelurahan, pendamping PKH, kepala lingkungan, fasilitas kesehatan, dan pihak perbankan. Masing-masing pihak memiliki peran dalam mendukung administrasi, pendampingan, pemutakhiran data, serta akses KPM terhadap bantuan.

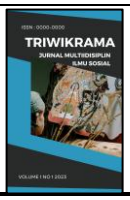
Berdasarkan wawancara dengan Lurah Lalang, pihak kelurahan berperan sebagai fasilitator dan koordinator. Kelurahan membantu administrasi masyarakat, menyediakan tempat untuk pertemuan kelompok, serta memfasilitasi proses pengusulan warga yang membutuhkan bantuan. Pengusulan tersebut dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel), yang dapat diawali dari laporan kepala lingkungan atau pengajuan masyarakat.

Lurah menjelaskan mengenai prosedur pengusulan warga miskin sebagai berikut: “SOP pengusulan harus melalui Musyawarah Kelurahan. Alurnya dimulai dari laporan Kepling atau pengajuan mandiri warga, lalu dilakukan verifikasi lapangan oleh tim kelurahan dan pendamping.” Setelah proses tersebut, data diusulkan melalui mekanisme administrasi yang berlaku dan diteruskan kepada instansi terkait.

Dalam pengelolaan data, kelurahan menggunakan SIKS-NG untuk mendukung proses administrasi dan pemutakhiran data. Namun, pelaksanaan sistem tersebut masih menghadapi

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7,, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kendala, termasuk perubahan data penerima serta keterbatasan kewenangan kelurahan dalam menetapkan hasil akhir. Lurah berharap hasil Musyawarah Kelurahan dapat memperoleh ruang verifikasi yang lebih besar karena aparat kelurahan dan kepala lingkungan dianggap lebih mengetahui kondisi nyata masyarakat setempat.

Koordinasi lintas sektor juga dilakukan dalam pemenuhan komponen kesehatan. Pendamping PKH berkoordinasi dengan kader posyandu untuk memantau kehadiran KPM dalam kegiatan kesehatan. Ibu Aminah menjelaskan bahwa koordinasi dengan kader posyandu membantu proses pelaporan kehadiran peserta secara teratur.

Pada proses pencairan bantuan, kendala yang ditemukan antara lain masalah kartu KKS, kartu yang tidak terbaca, masalah PIN, dan keterlambatan jadwal pencairan dari pusat. Ibu Rindri menjelaskan bahwa prosedur penggunaan kartu KKS relatif mudah dipahami karena cara penggunaannya menyerupai ATM. Namun, keterlambatan pencairan dapat menimbulkan kesulitan ketika keluarga sudah membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan anak.

Ia mengungkapkan, "Kami sudah telanjur berharap uangnya untuk beli perlengkapan sekolah anak yang mendesak, jadi harus putar otak mencari pinjaman dulu." Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kendala pencairan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga dapat memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan mendesak.

Dengan demikian, struktur birokrasi dan koordinasi antar-pihak telah mendukung pelaksanaan PKH di Kelurahan Lalang. Namun, pemutakhiran data, kewenangan verifikasi, penanganan masalah kartu KKS, dan ketepatan waktu pencairan masih menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.

Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga

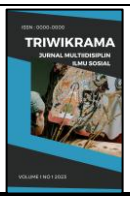
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi dalam membantu KPM memenuhi sebagian kebutuhan dasar keluarga, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Manfaat yang dirasakan setiap keluarga berbeda sesuai komponen bantuan dan kebutuhan rumah tangganya. Pada bidang pendidikan, bantuan membantu keluarga membiayai kebutuhan sekolah anak, seperti perlengkapan belajar, seragam, dan kebutuhan operasional pendidikan lainnya. Bantuan tersebut menjadi penting bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi, terutama ketika kebutuhan sekolah tidak seluruhnya dapat dipenuhi dari pendapatan rumah tangga.

Pada bidang kesehatan, pelaksanaan PKH mendorong KPM untuk memanfaatkan layanan kesehatan, termasuk posyandu bagi ibu dan anak. Pengalaman Ibu Aminah menunjukkan bahwa pemantauan kesehatan balita dilakukan melalui penimbangan, imunisasi, serta pemeriksaan tumbuh kembang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban penerima manfaat sekaligus mendukung perhatian keluarga terhadap kesehatan anak. Pada komponen lansia, bantuan PKH membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat yang tidak lagi memiliki penghasilan tetap. Bagi kelompok ini, bantuan menjadi dukungan penting dalam menghadapi keterbatasan ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan belum mencukupi seluruh kebutuhan keluarga. Penerima manfaat masih menghadapi pengeluaran lain di luar komponen bantuan, sementara keterlambatan pencairan dapat menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, persoalan ketidaksesuaian data menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.

Berdasarkan temuan tersebut, PKH berperan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Manfaatnya terlihat dalam dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar, tetapi pelaksanaan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 7„ Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



program masih memerlukan perbaikan pada ketepatan sasaran, penyampaian informasi, koordinasi, dan kelancaran pencairan agar manfaatnya dapat diterima secara lebih optimal.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sejumlah kendala dalam proses implementasinya. Berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan George C. Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, pelaksanaan program didukung oleh koordinasi antara pihak kelurahan, pendamping PKH, kepala lingkungan, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

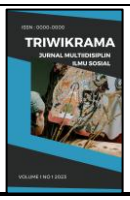
Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi mengenai program dilakukan melalui pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), koordinasi langsung, serta pemanfaatan grup WhatsApp. Kegiatan tersebut membantu KPM memahami informasi, hak, dan kewajiban sebagai penerima bantuan. Namun, penyampaian informasi belum sepenuhnya optimal karena sebagian KPM, terutama lanjut usia, mengalami keterbatasan dalam menggunakan telepon seluler, sedangkan KPM yang bekerja terkadang kesulitan mengikuti pertemuan. Selain itu, masih terdapat kesalahpahaman masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan dan mekanisme penetapan KPM.

Pada aspek sumber daya, bantuan PKH membantu keluarga penerima dalam memenuhi sebagian kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar anggota keluarga lanjut usia. Meskipun demikian, bantuan yang diterima belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Kendala lain berkaitan dengan ketepatan data penerima, keterbatasan akses terhadap informasi data penerima, serta hambatan teknis dalam proses pencairan bantuan. Sementara itu, pada aspek disposisi, komitmen pendamping PKH dan pihak kelurahan dalam memberikan pelayanan serta partisipasi KPM dalam mengikuti kegiatan program menjadi faktor pendukung implementasi. Namun, masih ditemukan kecemburuan sosial dan kesalahpahaman di masyarakat terkait penetapan penerima bantuan.

Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan PKH didukung oleh prosedur pengusulan dan verifikasi data melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel), koordinasi antara pihak kelurahan dan pendamping PKH, serta pemanfaatan sistem SIKS-NG. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak terkait untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan KPM. Akan tetapi, kendala administrasi, ketidaksesuaian data, dan masalah teknis kartu Keluarga Sejahtera (KKS) maupun ATM masih dapat menghambat kelancaran penerimaan bantuan.

Secara keseluruhan, PKH memberikan kontribusi dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta kebutuhan dasar anggota keluarga lanjut usia. Namun, program ini belum sepenuhnya mengatasi persoalan kesejahteraan keluarga karena bantuan yang diberikan bersifat terbatas dan masih dipengaruhi oleh ketepatan data, kelancaran pencairan, serta pemahaman KPM terhadap tujuan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas komunikasi dan pendampingan, pembaruan data penerima secara lebih akurat, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan pemahaman KPM agar pelaksanaan PKH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com



Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Bagi pihak Kelurahan dan Pendamping PKH, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi mengenai kriteria penerima, mekanisme penetapan bantuan, serta hak dan kewajiban KPM untuk mengurangi kesalahpahaman dan kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif dalam pemutakhiran dan verifikasi data agar bantuan lebih tepat sasaran serta pendampingan melalui kegiatan P2K2 dapat berjalan optimal.
2. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diharapkan dapat memanfaatkan bantuan PKH secara bijak dan sesuai kebutuhan, terutama untuk mendukung pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta kebutuhan dasar keluarga. KPM juga diharapkan aktif mengikuti kegiatan pendampingan dan memenuhi kewajiban program yang telah ditetapkan.
3. Bagi pemerintah dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan data penerima, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menangani kendala administrasi dan pencairan bantuan agar penyaluran berlangsung lebih tepat waktu. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria dan memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan mereka.

5. DAFTAR PUSTAKA

Edwards, G. C., III, (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.

Husin, Muhammad Syarif, dan Budi Setiawati. 2024. "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 7:815–29.

Kementerian Sosial RI. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021–2024*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kuncoro, M. (2002). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan kebijakan* (Edisi ke-3). Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

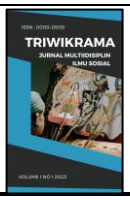
Larasati, Dian. 2022. "Kesejahteraan Pendamping di Wilayah Perkotaan (Studi Deskriptif Pendamping PKH di Jakarta Timur)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(2):2502–8. doi:10.36312/jisip.v6i1.3160.

Mahmud, Fajrin, Nuryanti Mustari, dan Nasrul Haq. 2020. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kabupaten Enrekang." *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 6(1):17–33. doi:10.26618/kjap.v6i1.3396.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy. HarperCollins.*

Muliana, Lia, Mursyidin, dan Muharriyanti Siregar. 2021. "Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Public Policy* 7(2):92–96. doi:10.35308/jpp.v7i2.3417

Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta*: Rajawali Pers.



Solikatun, Supono, Yulia Masruroh, dan Ahmad Zuber. 2014. "Kemiskinan dalam Pembangunan." *Jurnal Analisa Sosiologi* 3(1):70–90.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Suharto, E. (2014*). Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*. Alfabeta.

Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI.

*Corresponding author
E-mail addresses: emailpenulis@gmail.com